

Perubahan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 Pada Tahun 2019-2021

Risa Khusnul Khotimah¹, Zulvy Fauziah², Mutiara Nazwa³, Nanda Andi
Purnamansyah⁴, Singgih Susilo⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: risa.khusnul.2007226@students.um.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan hampir seluruh sektor dan sendi kehidupan masyarakat termasuk provinsi Jawa Timur terutama pada mobilitas sosial dan sektor perekonomian. Pandemi menimbulkan terjadinya peningkatan pengangguran dan menjadikan seseorang lebih mudah berada dalam kondisi miskin yang secara agregat akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena dampak Covid-19 terhadap perekonomian yang sangat luas, perlu dilakukan analisis perubahan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada sebelum dan sesudah pandemi. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar perubahan jumlah penduduk miskin dan pengaruh pandemi bagi kondisi perekonomian penduduk Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasilnya penduduk miskin di Jawa Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pembatasan lapangan pekerjaan, PHK, kurangnya produktivitas akibat terjangkit Covid-19, dll. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berjumlah 4.112,25 ribu jiwa atau sebesar 10,37% sementara setelah pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 4.572,73 atau 11,40% pada tahun 2021.

Kata Kunci: Penduduk miskin; Covid-19; Perubahan

Abstract

Covid-19 pandemic has paralyzed almost all sectors and joints of people's lives, including the province of East Java, especially in social mobility and the economic sector. The pandemic causes an increase in unemployment and makes it easier for someone to be in poor conditions which in aggregate will increase the number of poor people. Due to the very broad impact of Covid-19 on the economy, it is necessary to analyze changes in the number of poor people in East Java before and after the pandemic. It aims to identify how big the change in the number of poor people and the impact of the pandemic on the economic condition of the East Java population. This type of research is descriptive research with the data source used is secondary data. As a result, poor people in East Java are affected by several factors such as job restrictions, layoffs, lack of productivity due to contracting Covid-19, etc. In 2019 the number of poor people in East Java was 4,112.25 thousand people or 10.37% while after the Covid-19 pandemic the number of poor people increased to 4,572.73 or 11.40% in 2021.

Keyword: *Poor people; Covid-19; Changes*

Pendahuluan

Kemiskinan telah menjadi masalah utama bagi banyak negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti sandang, pangan, papan, dan obat-obatan (Hardinandar, 2019 dalam Priseptian & Primandhana, 2022). Banyaknya penduduk miskin di berbagai daerah di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kurangnya lapangan pekerjaan serta kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam persaingan memperoleh pekerjaan. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan serta kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Terdapat dua macam kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam melampaui suatu garis kemiskinan yang sudah ditetapkan atau sesuai pada indikator atau kriteria yang akan digunakan (Rahmawati, dkk., 2021). Teori kemiskinan menggunakan paradigma demokrasi-sosial yang melihat kemiskinan sebagai persoalan struktural. Adanya ketidakadilan dan ketimpangan di dalam masyarakat yang mengakibatkan kemiskinan berada di masyarakat. Peran negara dalam pendekatan ini sangat penting terutama dalam merumuskan strategi dalam menanggulangi kemiskinan secara institusional (lembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Strategi dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan teori ini, yaitu penyaluran endapatan secara universal, perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara dan kebijakan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengukur kemiskinan menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan pendekatan dari *World Bank*. Pendekatan tersebut memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan baik pengeluaran untuk makanan maupun bukan makanan. *World Bank* menyatakan kemiskinan sebagai tercabutnya hak seseorang atau keluarga dari kehidupan yang layak. Berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang menjadi miskin bukan berasal dari kelemahan mereka, tetapi keadaan yang terjadi di luar kendali mereka.

Dunia pada akhir tahun 2019 dikejutkan dengan munculnya virus baru yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, kemudian diidentifikasi sebagai virus korona di tahun 2020. Pada 31 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa *Coronavirus* menjadi sebuah bencana epidemi global yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Rahmawati, dkk., 2021). Orang yang terinfeksi virus korona mayoritas akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang tetapi pada anak-anak, orang tua, dan yang memiliki penyakit lain seperti pernapasan kronis, kardiovaskular, dan diabetes lebih memungkinkan mengalami penyakit serius hingga kematian. Kasus Covid-19 ditemukan pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai bencana skala nasional (Setyadi & Indriyani, 2021). Pada Februari 2021 terdapat 1.191.990 penduduk

Indonesia yang dinyatakan terinfeksi Covid-19, untuk menekan penyebaran virus tersebut pemerintah Indonesia memberlakukan larangan mudik bagi perantau di seluruh Indonesia (Goma, 2021). Beberapa kebijakan pemerintah belum mampu menghambat laju penularan Covid-19 hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan mobilitas serta aktivitas masyarakat di luar rumah sangat terbatas (Nuryanti & Soebagijo, 2021). Kebijakan PSBB mengharuskan sebagian besar industri, perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, pariwisata, dan instansi pendidikan membatasi dengan ketat aktivitasnya bahkan dilarang beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Hal tersebut dapat berimbas pada kerugian ekonomi serta terganggunya mata rantai pasokan kebutuhan juga produksi barang dan jasa (Misno, 2020 dalam Yamali dan Putri, 2020).

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan hampir seluruh sektor dan sendi kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia terutamanya pada mobilitas sosial dan perekonomian (Rosyadi, 2021). Negara berkembang di Asia dinilai lebih sulit untuk mengatasi Covid-19 karena kurangnya akses fasilitas dasar tidak seperti pada negara maju, sehingga negara dengan penghasilan rendah akan lebih rentan pada saat pandemi (Khan, *et al.*, 2020 dalam Setyadi & Indriyani, 2021). Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 menjadi minus 5,32% menurut BPS. Menurunnya tingkat konsumsi dan ketidakpastian bursa saham di masa pandemi berimbas pada sektor ketenagakerjaan yang terpaksa merumahkan karyawan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) (Bahasoan, dkk., 2021). Kementerian ketenagakerjaan mencatat terdapat 2.084.593 orang yang di PHK karena Covid-19. Hal tersebut menimbulkan terjadinya peningkatan pengangguran dan menjadikan seseorang lebih mudah berada dalam kondisi miskin yang secara agregat akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selain angka kematian dan pengangguran, angka kemiskinan juga ikut meningkat selama masa pandemi (Goma, 2021). Berdasarkan data dari Susenas, di tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mengalami penurunan tetapi pada Maret 2020 terjadi peningkatan sebanyak 1,63 juta penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 adalah 27,55 juta jiwa, sehingga selama periode Maret-September 2020 penduduk miskin Indonesia bertambah sebanyak 2,76 juta dari September 2019 (Setyadi & Indriyani, 2021).

Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke-empat provinsi dengan jumlah penduduk terkonfirmasi Covid-19 terbanyak dan tingkat mortalitas paling tinggi di Indonesia. Tingginya kasus positif *Coronavirus* di Jawa Timur mengakibatkan sektor ekonomi yang melemah terutama dalam bidang distribusi barang dan jasa serta pariwisata. Kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas bagi masyarakat juga berimbas pada pedagang dan usaha-usaha kecil. Selain PHK, banyak pula pelaku usaha yang mengalami kerugian di masa pandemi. Rosyadi (2021) menyatakan tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur pada 2020 naik sebesar 2,02 poin dari 2019 menjadi 5,84. Covid-19 menyebabkan masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan serta

jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Oleh karena dampak Covid-19 terhadap perekonomian yang sangat luas, perlu dilakukan analisis perubahan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada sebelum dan sesudah pandemi. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar perubahan jumlah penduduk miskin dan pengaruh adanya pandemi bagi kondisi perekonomian penduduk di Jawa Timur. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai permasalahan perubahan jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada saat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 perlu dilakukan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder serta data kualitatif berupa informasi yang direpresentasikan dalam identifikasi dan analisis (Sugiyono,2017). Data sekunder diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik Jawa Timur, studi pustaka dari jurnal serta artikel ilmiah, buku, dan laman resmi lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan olah data sekunder. Visualisasi data kuantitatif dibuat dalam bentuk grafik perbandingan antara tahun 2019-2021.

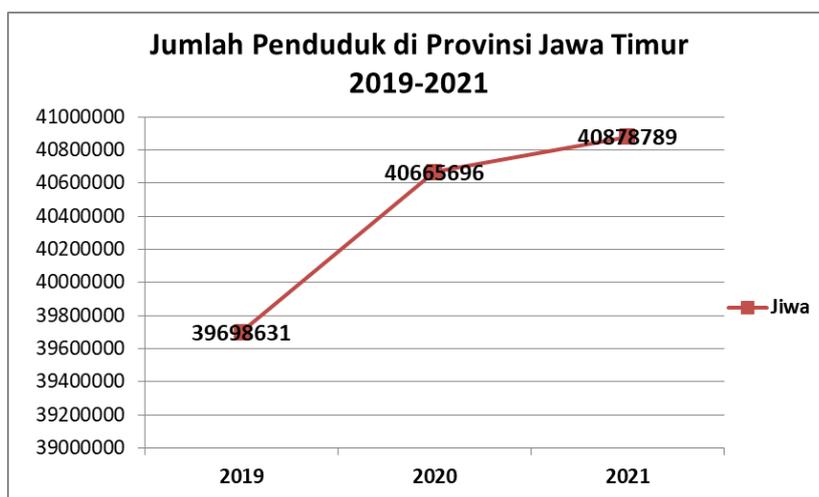
Hasil dan Pembahasan

Pandemi Covid-19 telah mengganggu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang melambat dan membuat stabilitas perekonomian penduduk cenderung turun serta berada dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2021 cukup tinggi apabila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Menurut data BPS Jawa Timur, jumlah penduduk miskin pada masa pandemi Covid-19 bulan Maret tahun 2021 sebesar 4.573 ribu jiwa yang dibedakan menjadi penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan di Jawa Timur pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020 setelah pandemi memasuki Indonesia. Persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, kemudian naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan di Jawa Timur masih tinggi pada periode September 2020 hingga Maret 2021. Disparitas semakin menyempit dengan bukti terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan penurunan kemiskinan di perdesaan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah kemiskinan terjadi paling tinggi di daerah perkotaan karena sektor perekonomian di perkotaan lebih kompleks daripada sektor di perdesaan. Wilayah perkotaan merupakan roda penggerak perekonomian utama di Jawa Timur. Pandemi mengakibatkan muncul banyak pengangguran baru karena PHK juga terganggunya mobilitas pekerja atau usaha serta mata rantai distribusi barang dan jasa.

Perubahan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur selama pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 selama bulan Maret 2021 sebanyak 10.099 kasus sedikit lebih tinggi dari kondisi

September 2020 yakni 10.012 kasus. Hal ini mempengaruhi masa produktif dan tingkat kesehatan penduduk itu sendiri. Penduduk dibatasi oleh isolasi mandiri sehingga pekerjaan juga tertunda sementara. Pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan berkerumun sehingga perilaku mobilitas penduduk cenderung menurun. Perusahaan, tempat perdagangan/ritel, pertokoan, para pedagang kaki lima, wahana rekreasi, taman, dan tempat pariwisata yang sebelumnya ramai pengunjung dan karyawan kehilangan pemasukan setiap harinya karena adanya pembatasan kegiatan demi menekan penyebaran Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah melaporkan pemutusan hubungan kerja paling tinggi terjadi di Jawa Timur yaitu kurang lebih sebanyak 59 ribu tenaga kerja yang terkena PHK pada masa Covid-19 di tahun 2020. Inflasi umum yang rendah selama periode September 2020-Maret 2021 yaitu sebesar 1,36 persen. Selama periode tersebut juga terjadi penurunan andil kelompok 40 persen penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terhadap distribusi pengeluaran baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.



Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik Jawa Timur, grafik tersebut menunjukkan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021. Sebelum pandemi Covid-19 jumlah penduduk Jawa Timur adalah 39.698.631 jiwa dan meningkat sebanyak 1.180.158 jiwa pada masa pandemi tahun 2021. Kepadatan dan tingginya jumlah penduduk ikut berkontribusi dalam penyebaran Covid-19. Tingginya mobilitas di Jawa Timur terutama pada wilayah kota yang padat menyebabkan penyebaran Covid-19 lebih mudah. Kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial oleh pemerintah memiliki dampak yang lebih besar terhadap wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Pembatasan sosial tersebut berpengaruh pada kondisi perekonomian penduduk. Banyak penduduk yang sebelumnya tidak berada dalam kondisi miskin pada akhirnya menjadi miskin karena adanya pembatasan sosial yang mempersulit dalam melakukan pekerjaan.



Gambar 2. Grafik Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2021

Sejalan dengan penduduk yang terus bertambah meskipun masa pandemi berlangsung, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berjumlah 4.112,25 ribu jiwa atau sebesar 10,37% sementara setelah pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin menjadi 4.572,73 atau 11,40% pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak pula penduduk miskin baru pada masa pandemi. Tiga data mengenai perubahan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin memiliki pola yang sama yaitu sama-sama meningkat hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan cukup signifikan dari tahun 2019 baik data jumlah penduduk maupun jumlah penduduk miskin. Pandemi Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal 2020 sehingga memiliki kemungkinan menyumbang faktor terhadap terjadinya peningkatan penduduk miskin di Jawa Timur.

Kasus penyebaran Covid-19 yang mendunia mengakibatkan semua aktivitas masyarakat dan perekonomian di Jawa Timur menjadi redup dan mengalami penurunan yang sangat drastis. Munculnya pandemi berujung pada terjadinya penurunan pendapatan per kapita disebabkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan, kendala waktu kerja, penurunan upah, dan penurunan produktivitas kerja. Penurunan pendapatan pekerjaan memiliki hubungan adanya pembatasan masyarakat dalam melakukan mobilitas perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Masyarakat Indonesia termasuk Jawa Timur memiliki profesi yang mengandalkan upah harian, baik itu dari kegiatan berdagang, pariwisata (hotel dan agen travel), serta kegiatan perekonomian lainnya. Kebijakan memberlakukan *lockdown* atau mengunci akses masuk dan keluar wilayah akan sangat merugikan bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian di Jawa Timur serta menurunkan jumlah penduduk miskin, pemerintah terus gencar melaksanakan

program-program. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis pada masa pandemi karena sebanyak 97% tenaga kerja diserap melalui UMKM. Melihat besarnya pengaruh UMKM pada perekonomian nasional, maka pemerintah pusat melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk UMKM (Rapitasari, 2021). Namun, masih terdapat 7 juta pekerja kehilangan pekerjaan dari 30 juta UMKM yang bangkrut pada Maret 2021 (Nasrun, 2020). Permasalahan ini diatasi dengan menjalankan program pembangunan lapak UMKM pada tiap kelurahan untuk menghidupkan kembali perputaran ekonomi secara merata yang dimulai sejak pertengahan tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat strategi pemulihan ekonomi di Jawa Timur melalui program "Jatim Bangkit" yang dibuat untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Jatim Bangkit adalah keseluruhan rencana untuk membantu pemimpin mengarahkan organisasi dan instansi di Jawa Timur sebagai upaya pemulihan kembali perekonomian, penanganan pandemi, serta respon terhadap ancaman perekonomian di Jawa Timur. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Timur diantaranya adalah pemulihan aktivitas perdagangan dan industri; mengatasi hambatan perdagangan baik bea masuk maupun regulasi ekspor impor; anggaran mayoritas dialokasikan pada kesehatan dan pendidikan agar dapat meringankan beban masyarakat; melanjutkan program subsidi industri kecil dan koperasi serta optimisme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur; mengaktifkan seperti semula agroindustri, pariwisata dan investasi; serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Kesimpulan dan Saran

Kemiskinan di Jawa Timur baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan perlahan meningkat saat pandemi Covid-19 mulai mewabah secara luas di Indonesia. Penduduk miskin di Jawa Timur sesudah mewabahnya pandemi mengalami peningkatan jumlah dibandingkan pada tahun 2019 sebelum Covid-19 memasuki Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi paling tinggi di daerah perkotaan karena sektor perekonomian di perkotaan lebih kompleks daripada sektor di perdesaan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk secara keseluruhan, semakin banyak pula penduduk miskin baru selama masa pandemi di Jawa Timur. Perubahan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur selama pandemi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tambahan kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19, tingginya pekerja yang terkena PHK, pemberlakuan pembatasan sosial, peluang lapangan pekerjaan berkurang, inflasi umum, serta penurunan andil kelompok 40 persen penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terhadap distribusi pengeluaran baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Strategi Pemerintah Jawa Timur dalam upaya memulihkan perekonomian pasca dilanda Covid-19 diimplementasikan dalam program Jatim Bangkit yang bertujuan

menggerakkan roda ekonomi masyarakat demi menyerap tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan menumbuhkan laju perekonomian.

Daftar Pustaka

- Andika, R., Rahajuni, D., & Alfarisy, F. (2022). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 Periode Tahun 2015-2020. In *MidYear National Conference and Call for Paper*, 1(1), 119-127.
- Auzar, Z. (2021.) Kemiskinan, Gender, dan COVID-19 Jatim: Feminization of Poverty, Multiple Pandemi, and Feminization of Pandemi. In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1). 248-287.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Perilaku Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, retrieved from <https://COVID-19.bps.go.id/>
- Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Rahmat, A., & Mukhram, M. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Meningkatnya Kemiskinan dan Pengangguran di Sulawesi Barat. *Media Bina Ilmiah*, 16(3), 6635-6642.
- Dwi Astutik, D. B. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Timur (Pendekatan Spasial). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Goma, E. I. (2021). Dampak COVID-19 Terhadap Isu Kependudukan di Indonesia. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 33-42.
- Iljasmadi, Z. I. (2021). Penurunan Perekonomian Masyarakat Solok Akibat Dampak Dari Pandemi COVID 19. *Jurnal Ensiklopedia*, 316-324.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (995-1115).
- McDaniel, P. N. (2022). Teaching, Learning, and Exploring the Geography of North America with Virtual Globes and Geovisual Narratives. *Journal of Geography*, 0(0), 1-16.
- Nasrun, M. A. (2020). Kekuatan Dasar di Kabupaten Kapuas Hulu. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 5(1), 32-40.
- Nuryanti, R. R., & Soebagijo, T. (2021). SEM-PLS Untuk Analisis Struktur Kemiskinan Pada Masa Pandemi COVID-19. In *Seminar Nasional Official Statistics 2021*, (1), 195-203.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. In *Forum Ekonomi*, 24(1), 45-53.
- Rahmawati, A., Lutfiani, L., Yunia, Z. R., Zahrok, F. F., & Wahyuningtyas, D. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Efektor*, 8(1), 79-88.
- Rapitasari, D. 2021. Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Timur melalui JATIM BANGKIT. *Majalah Ekonomi*, 26(1), 62-70.

- Rosyadi, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur Pada Masa dan Pasca Pandemi COVID-19; Refleksi Sosiologis. In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 1, No. 1).
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53-66.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384-388.